

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

Indra Mahardika Putra

Akuntansi, Fakultas Bisnis, Intitut Teknologi dan Bisnis Kalbis, Jakarta, Indonesia

E-mail korespondensi: indra.putra@kalbis.ac.id

Informasi Artikel

Draft awal: 3 Agustus 2017
Revisi: 15 September 2017
Diterima: 20 September 2017
Available online: 30 September 2017

Kata Kunci:

Preparation of Regional Budget Work Plan(RKA-SKPD)

Tipe Artikel : Research report



Diterbitkan oleh Fakultas
Ekonomi Universitas Islam
Attahiriyah

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the stages of the process of drafting the Regional Working Unit Budget Work Plan or in Indonesia called the Working Plan of Regional Working Unit Budget (RKA-SKPD) and what strategy is used by the regional apparatus unit or in Indonesia called the Regional Device Work Unit (SKPD) in budgeting. The research method is quantitative descriptive with data type is primary data and secondary data with data collection technique of interview and observation. The results of the study that (a). budget drafting process In Sleman District Youth and Sports Education Office has been in accordance with the Government Regulation of Finance Minister Regulation No 92 PMK.05, (b). Weak process of evaluation and monitoring of the program resulting in constraints on the process of delay in the disbursement of funds.

Tujuan penelitian untuk mengetahui tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja Daerah atau di Indonesia yang disebut Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan strategi apa yang digunakan oleh unit aparatur daerah atau di Indonesia dipanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun anggaran. Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan jenis data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil penelitian bahwa (a). proses penyusunan anggaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan No 92 PMK.05, (b). Lemahnya proses evaluasi dan monitoring program sehingga terjadi kendala pada proses keterlambatan dalam pencairan dana.

Pedoman Sitasi : Putra, Indra. M (2017). Proses Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2 (S1), 271 - 280

1. Pendahuluan

Sejalan dengan semangat reformasi yang masih berlangsung hingga saat ini, tuntutan beberapa daerah agar diberi otonomi yang lebih luas semakin kuat. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tonggak dimulainya otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 di atas, Pemerintah Daerah (Pemda) berkeinginan untuk memberdayakan semua potensi yang dimiliki yang bertujuan membangun dan mengembangkan daerahnya. Salah satu aspek penting yang berperan adalah sumber daya manusia (SDM) yang dalam hal ini adalah para pegawai di lingkungan Pemda (Ahmad, 2009). Para pegawai sebagai penggerak sekaligus pelaku pembangunan daerah harus memiliki kinerja yang baik. Dengan kinerja pegawai yang baik, maka kinerja Pemerintah Daerah bagi masyarakat juga akan baik.

Di dalam penyusunan anggaran keterlibatan karyawan atau pegawai Dinas Pendidikan sangat diperlukan. Dahulu penyusunan anggaran dilakukan dengan sistem *top-down*, dimana rencana dan besarnya anggaran telah ditetapkan oleh pusat sehingga daerah atau pelaksana hanya melakukan apa yang diinstruksikan dari atasan. Dalam hal ini jika penyusunan anggaran hanya berdasarkan kehendak atasan tanpa melibatkan partisipasi bawahan maka dapat menimbulkan kesulitan bagi bawahan untuk mencapainya. Sebaliknya jika penyusunan anggaran hanya disusun sesuai kehendak bawahan maka juga dapat menimbulkan rendahnya motivasi bawahan dalam mencapai target-target yang optimal. Keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran akan sangat memungkinkan mereka untuk memberi informasi lokal yang diketahui. Dengan cara ini, bawahan dapat mengkomunikasikan atau mengungkapkan beberapa informasi pribadi yang mungkin dapat dimasukkan dalam standar atau anggaran sebagai dasar penilaian.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi nilai anggaran sector publik yang efektif, efisien, dan ekonomis (*value for money budget*). Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian pemerintah. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Dalam siklus anggaran, persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia, dimana penentuan taksiran ini dilakukan dengan proses estimasi. Dalam persoalan estimasi, terdapat faktor *uncertainty* yang cukup tinggi (Mardiasmo, 2009). Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya dapat memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing* yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit kerja pemerintah. Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat, membutuhkan suatu strategi dalam mengelola aspek keuangan. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu melalui anggaran belanja, karena dengan anggaran belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dapat merencanakan pengalokasian dana jangka pendek yang dibutuhkan serta dapat melakukan pengendalian keuangan. Selain itu, Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dapat menggunakan anggaran belanja sebagai alat pengendalian bagi penggunaan dananya.

Apabila terdapat perbedaan antara anggaran belanja dengan realisasinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan anggaran belanja tahun berikutnya.

Dalam upaya mengembangkan efisiensi dan keefektifan program anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap nilai tepat guna kepada sasaran program baik itu instansi, pegawai maupun masyarakat sehingga menghasilkan kualitas suatu anggaran yang optimal pada daerah akan tercapai. Pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, proses monitoring dan evaluasi untuk program-program anggaran tahun berjalan dipantau pada sisi prosesnya saja.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan proses penyusunan anggaran di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dengan Peraturan Menteri Keuangan. Untuk mengetahui kendala dan kelemahan dalam proses penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Dan untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam proses penyusunan anggaran di masa mendatang.

2. Litelature Review

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

Penyusunan anggaran adalah suatu proses dalam pembuatan rencana kerja untuk jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter dan dalam satuan kuantitatif lainnya. Menurut Mulyadi (2001) proses penyusunan anggaran merupakan tahap akhir proses perencanaan, yang dilaksanakan melalui empat tahap yaitu filosofi dan misi, penetapan tujuan dan strategi, *programming* dan *budgeting*. Dalam penyusunan anggaran terdapat proses yang harus dilalui, dimulai dari perencanaan strategi yang didalamnya terdapat proses penetapan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan yang dipilih, kemudian penyusunan program-program untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan strategi. Faktor dominan yang terdapat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran adalah tujuan dan target yang hendak dicapai, ketersediaan sumber daya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran (Mardiasmo, 2005).

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) adalah merupakan pedoman pelaksanaan program atau kegiatan. Proses penyusunan RKA-KL menurut Peraturan Menteri Keuangan No 105/2008 dalam Listiyowati (2009) adalah (1). RKA-KL yang memuat uraian tentang visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil, kegiatan dan keluaran yang diharapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga disusun setelah menerima Surat Edaran keuangan, (2). RKA=KL disusun dengan memprioritaskan kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas Kementerian Negara/Lembaga, kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multi years*), (3) Untuk pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang standar biaya khususnya belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka lembaga mengajukan pengalokasian dananya dengan Kerangka Acuan dan Rincian Anggaran Biaya.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan analisa kualitatif. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan sejauh mana partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran. Moleong (2006) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode survei dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan anggaran. Survei atau lebih lengkapnya *self-administered survey* adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu (Jogiyanto, 2007).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Yogyakarta. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai proses penyusunan anggaran atau yang lebih dikenal dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Yogyakarta dan realitas organisasi pemerintah sebagai sebuah komunitas yang di dalamnya terjadi interaksi antara individu dan struktur organisasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (observasi dan wawancara) dan Penelitian Kepustakaan, dimana penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literature yang bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.3 Instrumen Penelitian

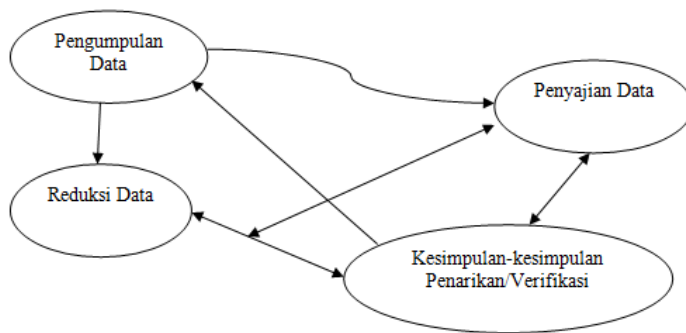
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dimana daya penalaran atau daya pikir dari peneliti itu sendiri merupakan alat penelitiannya sugiyono (2011). Nasution (1988) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada manusia sebagai instrument penelitian utama. Di antara perangkat lunak yang ada, dalam penelitian ini menggunakan NVIVO 8. Alasan dipilihnya software tersebut karena lebih general di bandingkan dengan yang lain. Earl Babbie (2010) memberikan saran untuk menggunakan NVivo karena program ini tergolong populer. Dengan ini peneliti dapat membuat klasifikasi, mengurutkan, memeriksa relasi dalam data dan mengombinasikan analisis dengan *linking, shaping*, pencarian dan pemodelan.

3.4 Teknik Analisis

Inti dari analisis data kualitatif adalah mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikan dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul satu dan yang lainnya berkaitan. Langkah pertama dalam penelitian kualitatif adalah mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian, menguraikannya dengan memasukkan informasi tentang konteks suatu tindakan, intensitas dan makna yang mengorganisasikan tindakan itu dan perkembangannya secara evolusi.

Sesuai dengan program NVIVO, sedikitnya ada dua pakar peneliti kualitatif yang dapat menuntun kita dalam menggunakan NVIVO sebagai salah satu alat untuk membantu kita dalam menganalisis, yaitu Miles dan Huberman, dan Spradley yang dikenal dengan analisis Doaminnya. Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Telah dikemukakan tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang saling berkaitan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut "analisis". Dengan demikian, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang susul-menyusul.



Gambar.1 Proses Olah NVivo 8

4. Hasil dan Pembahasan

Peneliti disini ingin memfokuskan pembahasan item anggaran pada klasifikasi anggaran urusan wajib kepemudaan dan olahraga. Alasan pemilihan ini karena peneliti melihat program-program yang dianggarkan dalam kategori ini keseluruhan merupakan program-program yang dianggarkan sendiri atau dengan kesengajaan dianggarkan yang berdasarkan atas survey dan aspirasi dari masyarakat.

Peneliti menggunakan metode SMART dalam mengidentifikasi setiap program yang masuk dalam kategori ini. Peneliti ingin mengetahui kejelasan dari program yang dianggarkan (*specific*), keterukuran dari program tersebut (*measurable*), kerealistisan dari program (*attainable*), relevansi program (*relevant*), jangka waktu pelaksanaan program (*time-bound*). Berikut tabel analisis menggunakan SMART.

Tabel 2. Analisa S.M.A.R.T

No	Nama Program	S.M.A.R.T	Pembahasan
1	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	<p>S : Program ini bertujuan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan pemuda.</p> <p>M : Untuk mengukur prosesnya, program ini dapat terukur dengan baik. Namun untuk mengukur tepat guna, program ini tidak dapat diukur.</p> <p>A : Program ini dapat dicapai karena Dikpora Sleman telah bekerja sama dengan beberapa ulama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam melaksanakan program ini</p> <p>R : Layak untuk dilaksanakan karena program ini memang bidang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.</p> <p>T : Dilaksanakan dalam periode tahun pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini masih butuh penyempurnaan dalam keterukurannya. Karena Dikpora sendiri dalam mengukur program ini tidak diukur untuk nilai tepat gunanya. Namun berupa monitoring dan evaluasi proses pelaksanaannya. Jadi masih belum dapat diketahui apakah impact dari program ini sudah dirasakan dan mempengaruhi tingkat keimanan dan ketaqwaan pemuda tersebut atau belum.
2	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	<p>S : Program ini dilaksanakan untuk membina organisasi kepemudaan yang ada.</p> <p>M : Program ini dapat diukur dari prosesnya. Dengan cara monitoring program-program yang mereka laksanakan.</p> <p>A : Program ini dapat dicapai karena dikpora juga bekerja sama dengan kurang lebih 30 organisasi dan lembaga kepemudaan.</p> <p>R : Program ini layak untuk dilaksanakan karena masih dalam bidang tugas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.</p> <p>T : Dilaksanakan dalam periode tahun berjalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini sudah cukup baik karena Dikpora dalam melaksanakannya juga bekerja sama dengan organisasi kepemudaan. Sehingga keterukurannya dapat diketahui tingkat keberhasilan dan nilai tepat gunanya.

Tabel 2. Analisa S.M.A.R.T Lanjutan

3	Fasilitas Aksi Bakti Sosial Kepemudaan	<p>S : Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemuda akan pentingnya gotongroyong, saling membantu dan meningkatkan kesadaran sosial, dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan social pemuda.</p> <p>M : Untuk mengukur prosesnya, program ini dapat diukur. Namun untuk mengukur tepat guna, program ini tidak dapat diukur.</p> <p>A : Dapat dilaksanakan karena Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada.</p> <p>R : Program ini layak untuk dilaksanakan karena program ini dapat memfasilitasi gerakan-gerakan yang dapat menyadarkan akan pentingnya lingkungan kepada masyarakat dan program ini memang lingkup dari Dikpora.</p> <p>T : Dilaksanakan dalam periode tahun berjalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini masih butuh penyempurnaan dalam keterukurannya. Karena Dikpora sendiri dalam mengukur program ini tidak diukur untuk nilai tepat gunanya. Namun berupa monitoring dan evaluasi proses pelaksanaannya. Karena memang belum ada program pemerintah yang mengukur itu. Hanya keberhasilan dari sisi administrasinya saja. Jadi masih belum dapat diketahui apakah impact dari program ini sudah dapat dirasakan dan menumbuhkan serta meningkatkan sifat kesadaran social pemuda.
4	Pembinaan Budi Pekerti Pemuda	<p>S : Program ini dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan Budi Pekerti yang luhur kepada para masyarakat khususnya pemuda dengan kegiatan yang dapat meningkatkan Budi Pekerti mereka.</p> <p>M : Program ini masih kurang sempurna jika dilihat dari sisi keterukurannya. Karena pemerintah hanya mengukur tingkat keberhasilannya dilihat pada saat proses program ini berlangsung.</p> <p>A : Dapat dilaksanakan karena Dikpora juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan organisasi-organisasi kepemudaan.</p> <p>R : Program ini layak untuk dilaksanakan karena sesuai dengan bidang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.</p> <p>T : Dilaksanakan dalam periode tahun berjalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini sudah cukup baik. Karena dalam keterukuran program ini dapat dilihat dan diukur dengan baik pada saat proses program ini sedang berlangsung.
5	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	<p>S : Mengadakan penyuluhan dengan melakukan seminar-seminar ke organisasi-organisasi kepemudaan.</p> <p>M : Program ini masih kurang sempurna jika dilihat dari sisi keterukurannya.</p> <p>A : Dapat dilaksanakan karena Dikpora bekerja sama dengan organisasi-organisasi kepemudaan.</p> <p>R : Program ini layak untuk dilaksanakan sesuai dengan bidang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.</p> <p>T : Dilaksanakan dalam periode tahun berjalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini masih butuh penyempurnaan dalam keterukurannya. Karena Dikpora sendiri dalam mengukur program ini tidak diukur untuk nilai tepat gunanya. Namun berupa monitoring dan evaluasi proses pelaksanaannya.
6	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Siswa	<p>S : Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan seminar ke sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba.</p> <p>M : Program ini masih kurang sempurna jika dilihat dari sisi keterukurannya.</p> <p>A : Dapat dilaksanakan karena Dikpora juga bekerja sama dengan pihak sekolah-sekolah sehingga program dapat terealisasi.</p> <p>R : Program ini layak untuk dilaksanakan karena sesuai dengan bidang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman..</p> <p>T : Dilaksanakan dalam periode tahun berjalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini masih butuh penyempurnaan dalam keterukurannya. Karena Dikpora sendiri dalam mengukur program ini tidak diukur untuk nilai tepat gunanya. Namun berupa monitoring dan evaluasi proses pelaksanaannya. Karena memang belum ada program pemerintah yang mengukur itu. Hanya keberhasilan dari sisi administrasinya saja.

Tabel 2. Analisa S.M.A.R.T Lanjutan

7	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	<p>S : Program ini mendukung peningkatan pendidikan olahraga dan menyediakan wadah untuk kompetisi dengan melihat sejauh mana hasil pendidikan dan pembinaan olahraga disekolah.</p> <p>M : Program ini dapat diukur dari banyaknya kegiatan-kegiatan berupa kompetisi olahraga yang diadakan.</p> <p>A : Dapat dilaksanakan karena Dikpora juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan organisasi kepemudaan dan masyarakat sehingga dapat tercapai dan terlaksana.</p> <p>R : Program ini layak untuk dilaksanakan karena Sesuai dengan bidang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.</p> <p>T : Dilaksanakan dalam periode tahun berjalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini sudah cukup sempurna karena program ini sudah jelas tujuannya, dapat dicapai, dapat terlihat kegiatannya dan cukup terukur.
8	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga.	<p>S : Mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga</p> <p>M : Dengan banyaknya program dan peserta yang dalam program ini yaitu pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga dengan pembinaan rutin dengan organisasi olahraga dan sekolah yang ada.</p> <p>A : Dengan menitikberatkan pada proses pembelajaran praktik dan bekerja sama dengan pihak sekolah dan organisasi masyarakat yang ada program ini dapat dicapai.</p> <p>R : Program ini layak untuk dilaksanakan karena sesuai dengan bidang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.</p> <p>T : Dilaksanakan dalam periode tahun berjalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini masih butuh penyempurnaan dalam keterukurannya. Karena Dikpora sendiri dalam mengukur program ini tidak diukur untuk nilai tepat gunanya. Namun berupa monitoring dan evaluasi proses pelaksanaannya.
9	Pembinaan Olahraga Bagi Masyarakat	<p>S : Dengan melakukan program-program pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan olahraga dan kompetisi olahraga.</p> <p>M : Diukur dari banyaknya kegiatan dan kompetisi olahraga dan banyaknya partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan ini.</p> <p>A : Dapat dilaksanakan karena dikpora juga bekerja sama dengan organisasi pemuda dan masyarakat sehingga program ini dapat dilaksanakan dan tercapai.</p> <p>R : Program ini layak untuk dilaksanakan karena sesuai dengan bidang dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.</p> <p>T : Dilaksanakan dalam periode tahun berjalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program ini masih butuh penyempurnaan dalam keterukurannya. Karena Dikpora sendiri dalam mengukur program ini tidak diukur untuk nilai tepat gunanya. Namun berupa monitoring dan evaluasi proses pelaksanaannya.

Dari tabel analisis diatas diketahui bahwa kelemahan yang terdapat pada proses penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman terletak pada proses evaluasi dan monitoring. Karena dalam proses evaluasi dan monitoring yang dilakukan hanya sebatas administrasi. Keterukuran program dilihat dari adanya program yang berjalan, proses berjalannya program dan dana yang ada tidak melebihi dari yang telah dianggarkan. Keterukuran untuk nilai tepat guna masih kurang terukur. Sehingga impact yang ditimbulkan dari program tersebut tidak dapat terlihat.

4.1 Hasil Olah Data NVivo 8

Berdasarkan hasil penelitian yang diltelah dilakukan terhadap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, terdapat kendala dan kelemahan yang terjadi. Berikut hasil olah data NVivo 8. Dari hasil

analisis dapat dijelaskan bahwa peneliti setelah melakukan penelitian terhadap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman ditemukan beberapa kendala dan kelemahan. Kendala yang ada adalah seringnya terjadi keterlambatan dana. Keterlambatan dana itu sendiri terjadi bukan karena kesalahan dari SKPD yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, namun memang mekanisme pencairan dana dari pusat secara bertahap setiap bulan. Hal tersebut terjadi memang karena pendapatan Pemerintah Pusat didapat dari dua hal yaitu pendapat dari pajak dan pendapatan bukan dari pajak. Pendapatan terbesar adalah pendapatan yang berasal dari pajak. Dan pendapatan itu sendiri didapat bertahap setiap bulan dalam satu tahun. Sehingga dalam pencairannya sendiri pun secara bertahap.

Kelemahan yang ada adalah pada keterukuran kesuksesan program yang di anggarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Evaluasi yang dilakukan atau keterukurannya adalah bersifat administratif. Kesuksesan program dilihat dari adanya program, terlaksananya program tersebut, adanya dana dan tidak melebihi target yang dianggarkan. Sedangkan keterukuran terhadap manfaat dari program-program tersebut belum dapat terukur. Karena memang program yang mengukur itu tidak ada dalam anggaran. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa dalam pengukuran kesuksesan sebuah program yang telah dianggarkan tidak sampai pada manfaat dari program itu sendiri. Kurangnya keterukuran terhadap manfaat dari program-program yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah menyebabkan kurang relevannya program-program tersebut. Karena manfaat yang ditimbulkan dari program tersebut terhadap target sasaran program tidak dapat terlihat.

Kelemahan yang ditemukan oleh peneliti terhadap proses penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman adalah kurangnya monitoring dari pihak eksternal terhadap pelaksanaan program yang telah dianggarkan. Pengawasan atau monitoring yang dilakukan berasal dari pihak internal sendiri. Sehingga keterjadian dari program tersebut kurang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Analisis Pembahasan

Dari bahasan diatas, diketahui bahwa kendala dan kelemahan yang terdapat pada proses penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Kendala yang terjadi dalam proses penyusunan anggaran adalah keterlambatan dana. Sedangkan kelemahan yang ditemukan adalah pada proses evaluasi dan keterukuran terhadap program-program yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Setiap program yang dianggarkan sebaiknya memiliki unsur-unsur dari SMART yaitu spesifikasi program, keterukuran program, daya capai terhadap program-program tersebut, relevansi program dan juga jangka waktu dari pelaksanaan program tersebut. Keterukuran yang ada harusnya dapat menunjukkan manfaat dari program-program tersebut.

Program-program yang kurang dapat terukur nilai tepat gunanya adalah program-program yang bersifat meningkatkan kinerja dan kemampuan baik itu pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga maupun masyarakat. Karena sebaiknya SKPD dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman mengevaluasi setelah jalannya program tersebut. Dengan begitu, manfaat dari program tersebut dapat diketahui dan terukur apakah sudah dapat meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kualitas dari pegawai atau masyarakat sebagai sasaran program atau belum.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memang harus menganggarkan program tambahan untuk mengevaluasi manfaat dari program-program yang telah dilaksanakan. Dengan begitu, kita dapat mengetahui apakah program tersebut benar-benar bermanfaat dan layak untuk dianggarkan di periode mendatang. Selain itu, harus didukung juga dengan monitoring dalam pelaksanaan program yang telah dianggarkan. Sebaiknya, dalam melakukan monitoring, dilakukan kerjasama dengan pihak eksternal yang lebih independen.

5. Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian ini hanya mengambil data pada satu instansi pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan alat ukur yang berbeda dan dengan dikombinasikan dengan teknik analisis kuantitatif agar didapatkan hasil yang lebih relevan terhadap kajian ilmiahnya. Selain itu, penelitian mendatang dapat menambahkan variabel-variabel lain untuk konstruk pada aspek-aspek lainnya sehingga dapat dihasilkan penambahan dan pengembangan model yang variatif.

6. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan (a). bahwa proses Penyusunan anggaran Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan No 92 PMK.05, (b). Bahwa proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, terdapat beberapa kendala dan kelemahan yang terjadi yaitu lemahnya sistem evaluasi dan monitoring, sehingga berdampak pada keterlambatan pencairan dana dan proses penyusunan anggaran yang tidak efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriani, P. 1998. Pengaruh dalam Penyusunan Anggaran terhadap Kepuasan kerja dan Kinerja Manajer : Role Ambiguity sebagai Variabel Antara. *Tesis* (Tidak Diterbitkan). Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.
- Alim, M. N. 2008. *Efektifitas Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontinjensi Matching*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 10, No. 2 November 2008.
- Andraeni, N. N. N. 2003. Pengaruh Stres Kerja terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan PT. HM. Sampoerna Tbk Surabaya. *Tesis* (tidak Diterbitkan). Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Arifin, J. 2007. *Pengaruh Karakteristik Gaya Penyusunan Anggaran terhadap Efisiensi Biaya*. Sinergi Vol. 9 No. 1, Januari 2007.
- As'ad, M. 1991. *Psikologi Industri*. Yogyakarta: Liberty.
- Azwar, S. 1998. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* (Edisi ke-2). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Christina, E., dkk. 2002. *Anggaran Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Darsono dan Ari Purwanti. 2008. *Penganggaran Perusahaan*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Sleman. 2010. *Dokumen Pelaksanaan Anggaran*
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Sleman. 2011. *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)*. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Sleman.
- Hansen, D.R. dan M.M. Mowen. 2005. *Akuntansi Manajemen* (Terjemahan, jilid 1). Edisi ke-7. Salemba Empat, Jakarta.
- Hendardi, A. 2002. *Penyusunan Anggaran Berdasarkan Aktivitas (Activity Based Budgeting) pada Komponen Biaya Operasi Perusahaan Jasa (studi Kasus pada Divisi Forwarding PT (P) Kawasan Berikat Nusantara)*. Tesis pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.
- Megalow, R. 2007. *Analisis Selisih Anggaran Biaya Pabrik sebagai Alat Pengendalian Manajemen (Studi kasus: PT Unitex, Tbk Bogor)*. Skripsi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Mulyadi. 2002. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Edisi ke- 3. Salemba Empat, Jakarta.

- Munandar, M. 2001. Budgeting. Edisi ke-1. BPFE, Yogyakarta.
- Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan 1. Edisi ke-3. Salemba Empat, Jakarta.
- Nordiawan, D., I.S. Putra, M. Rahmawati. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat, Jakarta.
- Prawatiningsih, D. 2007. Evaluasi Anggaran Belanja sebagai Alat Pengendalian Keuangan (Studi Kasus : Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi). Skripsi pada Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Riduwan. 2005. Dasar-dasar Statistika. Alfabeta, Bandung.
- Tunggal, A.W. 2003. *Activity Based Budgeting (ABB)*. Harvarindo, Jakarta.
- Welsch, G.A., R.W. Hilton, P.N. Gordon. 2000. Anggaran: Perencanaan dan Pengendalian Laba (Terjemahan, Jilid 2). Salemba Empat, Jakarta.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik. [2 Agustus 2010].
- <http://www.investopedia.com/terms/a/abb.asp> [2 Agustus 2010]
- <http://www.ksap.org/Buletin/bultek05.pdf> [15 Desember 2010]
- <http://www.writework.com/essay/benefits-activity-based-budgeting>. [2 Agustus 2010]